

Strategi Diplomasi Asean Terhadap Jepang Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Di Asean

Tety Rachmawati
Dosen Universitas Potensi Utama
tetyspacerachmawati@gmail.com

ABSTRAK

Negara-negara anggota ASEAN setuju untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam upaya meningkatkan integrasi ASEAN, senada dengan tujuan pembangunan yang adil. Kesenjangan ekonomi antara anggota ASEAN dapat dilihat dari beberapa indikator seperti GDP, HDI, persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi antar Negara anggota ASEAN. Upaya ASEAN mengurangi kesenjangan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih tertinggal dalam hal ekonomil. Bantuan bukan hanya datangd a ri internal anggota ASEAN, namun juga dari Negara lain selain anggota ASEAN, misalnya Japan.penelitian akan membahas strategi diplomasi ASEAN dengan Jepang dalam upayanya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi ASEAN.metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber dieproleh dari surat kabar, majalah, buku, beberapa dokumen pendukung lain, dan artikel. ASEAN menggunakan strategi regional development cooperation (RDC) sebagai kerangka dasar bagi semua perjanjian dengan Negara Jepang.ASEAN menggunakan strategi koalisi dan forum. Berbagai forum iniasaisi dilakukan dalam kerangka RDC menyatakan Japan sebagai Negara donor untuk beberapa projek. Untuk bisa mendapatkan parallel dengan Negara Jepang, ASEAN meggunakan kerangka Dialogue Partners(DP). DP tidak memposisikan Negara kedua sebagai penerima donor, namun lebih sebagai partner.

Keywords: Strategi Diplomatik ASEAN, Ketidaksetaraan ekonomi ASEAN, Partner Dialog, Forum Shopping, Regional Development Cooperation

ABSTRACT

In an effort to improve integration, ASEAN countries agreed to reduce economic disparities as the goal of equitable development.Economic disparities in ASEAN can be seen from several indicators such as GDP, HDI, the percentage of poverty, infrastructure development and different economic development among ASEAN countries.ASEAN efforts in reducing this gap is done by providing assistance to countries that are still lagging behind.Aid not only the internal ASEAN but also from countries outside ASEAN, for example Japan.This research will discuss the strategy of ASEAN diplomacy toward Japan in efforts to reduce economic disparities in ASEAN.The method used is qualitative method, source taken from newspapers, magazines, books, some related documents, and articles.As a result, ASEAN usedregional development cooperation strategy (RDC) as a basic framework for all agreements agreed with Japan.ASEANused coalition and forum shopping strategy bycreating many forums. Various forums inisiativ within the framework of the RDC made Japan as a donor for several projects in the forums.To gain leverage parallel with Japan, ASEAN usedDialogue Partners(DP)framework.DP did not defend the second position as a donor-recipient, but rather be partners.

Keywords: ASEAN diplomatic strategy,ASEAN economic inequality, Dialogue Partner, Forum Shopping, Regional Development Cooperation

I. Pendahuluan

Arus globalisasi mendorong negara-negara ASEAN untuk terus meningkatkan integrasi wilayah, terutama dalam bidang ekonomi. Integrasi ekonomi dimaknai sebagai peningkatan hubungan ekonomi di suatu grup atau regional dengan menetapkan kebijakan tertentu. Kebijakan ini akan diimplementasikan oleh negara anggota, sebagai respon atas tuntutan perdagangan global. Tuntutan perdagangan global ini seperti, hasil dari Uruguay Round yang mengharuskan ASEAN menjadi regim perdagangan yang lebih liberal. Selain itu, tumbuh dan berkembangnya *North American Free Trade Area* (NAFTA) dan *European Single Market* menjadi ancaman bagi ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN perlu meningkatkan integrasi wilayah sebagai respon atas tuntutan global tersebut.

Integrasi ekonomi mampu mendorong ASEAN menjadi pasar yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Dengan jumlah penduduk sekitar 584 juta atau sekitar 8,8% penduduk dunia, ASEAN menduduki peringkat kesembilan sebagai negara dengan ekonomi terbesar, dengan GDP pada tahun 2009 mencapai 1.507 USD (Wibowo, 2013:190). Ini menjadi peluang bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara mitra ASEAN melalui perjanjian perdagangan bebas.

ASEAN berpotensi menciptakan basis produksi bagi pasar global dengan aktivitas ekonominya yang sangat dinamis. Ini dapat dilihat dari volume perdagangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari volume ekspor, kecenderungan ekspor negara-negara ASEAN naik dari tahun ke tahun. Angka ini mencapai 341 juta USD di tahun 1996 kemudian menjadi 770 juta USD di tahun 2006. Di samping itu, volume impor juga naik dari 376 juta USD di tahun 1996 menjadi 685 juta USD di tahun 2006. Namun, kenaikan nilai ekspor ASEAN lebih tinggi dibandingkan impornya, yakni sebesar 125% ekspor dan hanya 82,2% impor (Wibowo, 2013:190).

Namun, proses pencapaian integrasi ASEAN terlihat berjalan lambat, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan di negara-negara ASEAN (Menon, 2014). Kesenjangan terutama terlihat antara anggota lama dengan anggota baru ASEAN. Beberapa anggota lama merupakan negara maju seperti Brunei dan Singapura. Sedangkan, yang lain masih berada dalam masa transisi seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina. Sedangkan Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam merupakan negara dengan tingkat ekonomi kurang berkembang. Empat negara terakhir ini, Kamboja,

Myanmar, Laos dan Vietnam (CMLV) tergolong anggota baru, yang baru bergabung dengan ASEAN pada tahun 90-an.

Adanya kesenjangan ini berakibat pada ketidakstabilan finansial di tingkat regional ASEAN (Glass, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan melakukan pembangunan di negara anggota baru ASEAN. Beberapa upaya telah dilakukan ASEAN, seperti membangun kerjasama di internal dan eksternal ASEAN. Kerjasama di internal ASEAN dibangun oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand bersama negara-negara CMLV. Seperti kerjasama bantuan Singapura dalam program *Singapore Cooperation Programs (SCP)* yang didirikan pada tahun 1992. SCP focus pada membangun kapasitas manusia melalui pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga ahli yang berpengalaman. Singapura juga secara spesifik memberikan beasiswa bagi pelajar Kamboja yang berprestasi. Selain itu, Thailand sendiri memiliki *Thailand International Cooperation Agency (TICA)* yang bertugas untuk mengelola bantuan bagi negara-negara berkembang dengan membangun kapasitas teknis dan mengembangkan sumberdaya manusia. Pada tahun 2010, total bantuan Thailand mencapai 12 juta USD dan 60%-nya diberikan ke negara-negara CMLV (Carpenter, 2013:145). Sedangkan Malaysia dalam *Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP)* berupaya untuk membantu pembangunan sumberdaya manusia, membangun kapasitas seperti dalam bidang administrasi publik, pengurangan kemiskinan, pertanian, ICT, perbankan, mendukung investasi dan penguasaan bahasa Inggris.

Selain kerjasama antar negara anggota ASEAN, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar keanggotaan. Jika melihat sejarahnya, ASEAN merupakan organisasi yang dilahirkan sebagai reaksi terhadap faktor eksternal, karenanya regionalisme ASEAN tidak pernah mengabaikan pihak-pihak eksternal (Thambipillai, 2007:2). Seperti kerjasama yang dibangun dengan Jepang, yang meliputi berbagai bidang kerjasama, mulai dari ekonomi, sosial, budaya sampai pembangunan.

Dalam hubungan internasional, kerjasama pembangunan mulai diakui selama Perang Dunia Dua. Dimana Amerika melalui kebijakan luar negerinya mulai memberikan bantuan untuk negara-negara yang terlibat perang. Fungsi dari bantuan ini agar keseimbangan internasional secara bertahap dapat dipulihkan. Kerjasama pembangunan diartikan sebagai aktifitas yang secara eksplisit bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional atau internasional, tidak berorientasi pada profit (keuntungan), dan mendasarkan pada

hubungan kerjasama yang setara dimana tidak ada hubungan hirarki diantara partner (Alonso dan Glennie, 2015:2).Kerjasama pembangunan internasional juga diartikan sebagai “*a process that begins with the background for involvement by the donor actors*”(Martinussen et al. 20013:1).Dalam pengembangan lebih lanjut dirumuskan perihal hubungan *donor* dan *recipient* untuk tujuan pembangunan dan strategi. Dalam hal ini *donor* dan *recipient* merumuskan tujuan dan strategi secara bersama-sama, dan *recipient* seharusnya memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil(Holsti, 1998:653). Namun, pada kenyataannya dalam beberapa kasus pihak *donor* yang banyak menentukan agenda pembangunan, oleh karena itu perlu adanya strategi untuk membuat hubungan antara *donor* dan *recipient* ini sejajar.Dalam Upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, ASEAN menggunakan pendekatan kerjasama pembangunan regional atau *regional development cooperation*(RDC). Menurut Hurrel, kerjasama regional biasa menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal dan menempatkan posisi regional dalam berbagai institusi internasional atau forum-forum negosiasi, guna mencapai berbagai tujuan, nilai-nilai bersama, atau memecahkan berbagai persoalan bersama, terutama masalah yang muncul akibat adanya peningkatan interdependensi regional(Nuraeni, 2010:10).

Dalam kerangka RDC, kerjasama yang dilakukan ASEAN dalam upaya mempersempit kesenjangan dilakukan bersama Jepang.Dalam kerjasamanya, pembangunan difokuskan kepada proyek yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan memiliki dampak yang besar bagi pembangunan di kawasan.Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana strategi diplomasi negara-negara ASEAN terhadap Jepang dalam upaya mempersempit kesenjangan ekonomi di ASEAN, agar tercipta kerjasama yang sejajar diantara kedua belah pihak.

II. Gambaran Kesenjangan Negara-negara ASEAN

Mempersempit kesenjangan ekonomi merupakan sebuah tantangan besar bagi terealisasinya integrasi ekonomi ASEAN.Akibat adanya kesenjangan, negara-negara ASEAN yang tertinggal memiliki kapasitas yang masih rendah dalam merealisasikan kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang dihasilkan di tingkat ASEAN.Seperti temuan ADB dimana masih banyak negara ASEAN yang menggunakan *non-tariff measures* untuk membatasi perdagangan. Selain itu, implementasi perlindungan hukum terhadap buruh migran masih menjadi perdebatan antara negara pengirim dan penerima.Dalam hal ini,

negara pengirim menginginkan peraturan regional yang mengikat secara hukum. Sementara negara penerima lebih memilih peraturan yang tidak mengikat secara hukum. Padahal, negara-negara ASEAN sudah mengadopsi *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, yang seharusnya kebijakannya dapat diimplementasikan oleh negara-negara ASEAN.

Kesenjangan ekonomi diakibatkan oleh adanya ketidaksetaraan ekonomi (*economic inequality*). Dalam Merriam Webster, kesenjangan diartikan sebagai sebuah keadaan yang tidak adil yang mana beberapa orang memiliki kesempatan yang lebih baik dibanding orang yang lain. Menurut Andrew McKay kesenjangan mengakibatkan adanya perbedaan dalam standar hidup diantara masyarakat, "*inequality concerns variations in living standards across a whole population*" (McKay, 2002:1). Dalam hal ini, terdapat variasi standar hidup dimana terdapat jarak antara satu dengan lainnya. Ketidaksetaraan ekonomi sendiri adalah keadaan dimana ada perbedaan posisi dalam distribusi ekonomi seperti pendapatan, gaji/upah, dan kekayaan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan kesenjangan ekonomi ASEAN dengan beberapa indikator seperti *Gross Domestic Product (GDP)*, *Human Development Index (HDI)*, persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN. Seperti yang terlihat pada tabel berikut;

Tabel 1: Perbandingan Pembangunan di Negara-negara ASEAN

No	Negara	GDP 2013	HDI 2013	Persentase Kemiskinan	Infrastruktur Jalan yang Belum Diaspal (km)
1	Singapura	55.182	0,901	n/a	0
2	Brunei	39.679	0,852	n/a	202
3	Malaysia	10.420	0,773	1,7	46.165
4	Thailand	5.679	0,772	9	39.024
5	Indonesia	3.460	0,684	11,4	217.472
6	Vietnam	1.909	0,638	9,8	110.000
7	Filipina	2.707	0,660	25,2	6.155
8	Kamboja	1.037	0,584	19,8	45.785
9	Laos	1.548	0,569	24	37.104
10	Myanmar	888	0,524	23,6	118.763

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2014, www.asean.org.

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, terlihat bahwa Singapura dan Brunei selalu menempati posisi teratas untuk tingkat GDP, HDI, dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sedangkan di kolom kemiskinan tidak ada data yang tersedia. Di kedua negara ini hampir tidak ditemukan adanya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini, berbanding terbalik dengan negara-negara ASEAN lain, terutama CMLV yang memiliki rata-rata presentase kemiskinan lebih dari 20%. Jika dilihat dari tingkat GDP, GDP Singapura 50 kali lebih besar dari GDP Myanmar. Tidak hanya Myanmar, tetapi juga Laos, Kamboja, dan Vietnam masih memiliki GDP yang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Begitu juga jika Indonesia dibandingkan dengan Singapura, GDP Indonesia masih jauh dari Singapura, bahkan hampir 20 kali lipatnya. Dalam hal ini, Singapura dan Brunei digolongkan sebagai negara dengan pendapatan tinggi (*high income countries*). Sedangkan, Malaysia dan Thailand sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper middle income countries*), Indonesia dan Filipina negara masuk kedalam kategori negara dengan pendapatan menengah kebawah (*lower middle income countries*), dan Kamboja, Laos, Vietnam, serta Myanmar dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah (*lower income countries*).

Kemajuan sebuah negara juga dapat dinilai dari pembangunan infrastruktur. Tulisan ini menyajikan data pembangunan jalan sebagai salah satu indikator pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap perekonomian karena infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor riil terutama pada proses distribusi dan mobilisasi. Pengembangan infrastruktur jalan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengurangi biaya produksi dan biaya transportasi melalui peningkatan infrastruktur jalan, memperluas kapasitas produksi secara keseluruhan, menghubungkan pasar dengan fasilitas ekonomi lainnya yang mungkin sampai melampaui negara, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya (ADB, 2012:9). Jika dilihat dari tabel di atas, infrastruktur jalan aspal di Singapura sudah terpenuhi. Wilayah yang tidak terlalu luas juga memudahkan dalam pembangunan infrastruktur. Luas wilayah Singapura 719 km² dengan pembangunan infrastruktur jalan mencapai 3.324 km. Hal ini berbeda dengan Myanmar yang memiliki luas wilayah 676.578 km², dan hanya 148.690 km jalan yang sudah di aspal, sisanya 118.763 km belum diaspal. Hal ini sangat kontras dan sangat terlihat jelas adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan antara Singapura dan Myanmar.

Kesenjangan ini berpengaruh pada terhambatnya harmonisasi kebijakan di negara-negara ASEAN dan komitmen yang lemah dalam menciptakan basis produksi, dimana keduanya merupakan faktor penting dalam proses integrasi. Dengan adanya harmonisasi kebijakan, negara-negara ASEAN harus bersepakat untuk menerapkan kebijakan yang sama. Dalam proses regionalisme harmonisasi kebijakan dapat dibenarkan karena adanya kesamaan substitusi marginal rates dan transformasi di antara negara-negara yang terintegrasi secara ekonomi. Peter Smith menjelaskan konsep *depth* sebagai salah satu dimensi integrasi. *Depth* adalah tingkatan koordinasi kebijakan (harmonisasi) (Peter Smith dalam Anderson: 228). *Depth* merupakan konsekuensi yang harus diambil karena adanya proses integrasi.

Organisasi merupakan tempat pengambilan keputusan dan tempat akomodasi berbagai kepentingan. Harmonisasi kebijakan sangat penting guna mendukung penyeragaman kebijakan negara-negara anggota ASEAN. Harmonisasi kebijakan bertujuan untuk menghilangkan *misperception* diantara negara-negara anggota. Agar nantinya tidak ada negara anggota yang menentukan kebijakan sepihak sehingga merugikan negara lain. Namun, pada kenyataannya kesenjangan mendorong negara-negara ASEAN untuk tidak melakukan harmonisasi kebijakan. Ini terlihat dari adanya perbedaan dalam penetapan diberlakukannya CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) antar negara anggota ASEAN. Seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina yang melakukan penurunan hambatan tariff barang impor 0-5% pada 1 Januari 1993. Sedangkan, Vietnam pada 2006, Laos dan Myanmar pada 2008, dan Kamboja pada 2010. Artinya, harmonisasi sebagai salah satu indikator integrasi tidak dapat dicapai. Perbedaan pengurangan hambatan tariff ASEAN-6 dan CMLV ini menggambarkan tingkat kesiapan CMLV dalam FTA. Artinya, negara-negara anggota baru ASEAN belum memiliki kesiapan layaknya anggota ASEAN yang lain dalam menghadapi FTA. Karena adanya kesenjangan, harmonisasi kebijakan tidak terlalu diutamakan, hal ini dikarenakan menunggu kesiapan dari CMLV. Masalah baru yang kemudian muncul, negara-negara ASEAN kurang fleksibel dalam menciptakan harmonisasi kebijakan seperti keengganan untuk memasukkan produk di sektor strategis dari daftar CEPT. Masing-masing negara berusaha untuk mengamankan sektor prioritas yang menjadi andalan sehingga membatasi produk negara lain yang masuk ke dalam pasar domestik. Beberapa produk yang sering dipermasalahkan misalnya produk otomotif, petrokimia, dan pertanian. Ini bukti bahwa pelaksanaan CEPT Agreement masih tarik ulur.

Selain belum adanya harmonisasi kebijakan, beberapa negara ASEAN menunjukkan komitmen yang lemah dalam menciptakan basis produksi. Ini dapat dilihat dari komitmen yang lemah dalam menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif bagi para pemodal. Ketidamampuannya dalam membangun pemerintahan yang baik karena tingkat ekonomi yang lemah, diperburuk dengan lemahnya komitmen untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tingkat korupsi beberapa negara ASEAN yang masih tinggi. Menurut Transparency International 2012, dari 182 negara, Vietnam menempati urutan ke 112 negara terkorup, disusul oleh Laos pada posisi ke 154, Kamboja di posisi 164 dan Myanmar pada posisi 180. Tingkat korupsi yang sangat tinggi, menandakan buruknya pengelolaan institusi negara. Dalam sebuah penelitian yang dipaparkan oleh Paolo Mauro, ia mengatakan "*corruption discourages investment, limits economic growth, and alters the composition of government spending, often to the detriment of future economic growth*" (Paolo Mauro, 1997). Untuk menciptakan basis produksi tentu dibutuhkan investasi, dan untuk mengundang investasi dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua hambatan integrasi ini disebabkan oleh kesenjangan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Kesenjangan akan mempengaruhi proses integrasi yang selama ini sedang berjalan. Keadaan ini membuat integrasi ASEAN berjalan lambat. Integrasi ekonomi membutuhkan komitmen yang kuat dari negara-negara ASEAN untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan menciptakan basis produksi. Integrasi regional menuntut setiap negara untuk memenuhi standar ekonomi minimum dan melakukan pembangunan sosial, tanpa pembangunan tersebut, integrasi ASEAN akan menciptakan pihak yang menang dan yang kalah.

III. Signifikansi Jepang Bagi ASEAN

Menurut kerangka kerjasama RDC, kesenjangan di dalam ASEAN dapat dikurangi melalui bantuan dari pihak-pihak donor. Dalam penelitian ini, negara mitra yang menjadi mitra dialog ASEAN adalah Jepang. Jepang menjadi negara yang sangat signifikan bagi ASEAN dilihat dari sejarah panjang hubungan kedua belah pihak. Di awal tahun 1950-an beberapa negara-negara ASEAN sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang. Seperti Myanmar, Filipina, Indonesia, dan Vietnam Selatan bekerjasama dengan Jepang dalam upaya perbaikan perang. Hubungan dialog informal antara ASEAN dan Jepang dibangun sejak tahun 1973. Isu industri karet menjadi jembatan penghubung antara

ASEAN dan Jepang, yang pada akhirnya dibangun sebuah forum kerjasama *ASEAN-Japan Forum on Rubber*. Pemberian bantuan oleh Jepang sendiri dimulai pada tahun 1975, dimana Jepang sepakat untuk memberikan bantuan ekonomi melalui bantuan teknis untuk menyelesaikan masalah karet sintesis yang diproduksi Jepang.

ASEAN merupakan partner utama bagi ODA (*Official Development Assistance*) Jepang, hal ini tercantum dalam Japan's ODA Charter pada bagian ketiga tentang prioritas bantuan ODA Jepang (Cabinet decision, 1992). Sejak 1963, Jepang telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam memberikan bantuan kepada negara-negara mitranya. Pada tahun 1974, Jepang menempati posisi ke-4 sebagai donor terbesar di DAC (*Development Assistance Committee*). Pemerintah Jepang terus berkomitmen untuk meningkatkan program bantuan internasional jangka menengah, sehingga angkanya terus naik dari 3,3 milyar USD menjadi 9,36 milyar USD di tahun 1997 dan 13,4 milyar di tahun 2000. Antara tahun 1991 dan 2001, volume bantuan Jepang yang besar, membuatnya menjadi negara donor bilateral terbesar di dunia dan satu-satunya bantuan asing dalam sejarah yang dapat menggantikan posisi Amerika ditingkat teratas (David, 2013:148).

Jepang memberikan bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia pada tahun 1997 yang dikenal dengan sebutan *New Miyazawa Plan*. yang merupakan paket dukungan hingga total mencapai 30 milyar USD, dimana 15 milyar untuk perbaikan ekonomi jangka panjang dan 15 milyar untuk kebutuhan capital jangka pendek. Penerima bantuan ODA Jepang terbesar di ASEAN adalah Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Berikut diagram persentase ODA Jepang di masing-masing negara ASEAN:

Tabel 2: ODA Jepang di 8 Negara ASEAN Tahun 2011
Dalam juta US dollar

Rank	Negara	Bantuan Dana	Bantuan Pinjaman	Total
1	Vietnam	151,81	861,24	1.013,05
2	Kamboja	112,37	18,56	130,93
3	Laos	45,23	3,28	48,51
4	Myanmar	42,50	-	42,50
5	Malaysia	28,91	-49,92	-21,01
6	Thailand	53,14	-237,15	-184,01
7	Filipina	96,62	-663,51	-566,86
8	Indonesia	134,12	-767,83	-633,71

*Angka negative menunjukkan bahwa jumlah pinjaman melebihi dari jumlah yang disalurkan

Sumber: website Ministry of foreign Affairs of Japan

Selain itu, dalam bidang perdagangan, Jepang juga memiliki arti penting bagi ASEAN. Jepang merupakan pasar bagi produk negara-negara ASEAN. Ekspor ASEAN ke Jepang mencapai 23-30% dari total ekspornya (Sing, 2001:155). Hal ini paling terlihat dalam ekspor Indonesia, kemudian diikuti oleh Thailand, Filipina, dan Malaysia dimana sebagian besar ekspor didominasi oleh minyak, batu bara, kayu dan makanan. Besarnya volume ekspor ini mengindikasikan bahwa Jepang merupakan pasar yang penting bagi ASEAN.

Diplomasi yang dibangun oleh ASEAN dengan Jepang harus menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang adil dalam perundingan tersebut. Adil menurut John Rawls berarti mendukung adanya proporsi seimbang jika terdapat perbedaan objektif untuk menjamin penukaran hak dan kewajiban antar pihak tetap proporsional. Diperlukan adanya asas perbedaan (*different principle*) dan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil (*principle of fair equality and opportunity*) sehingga memunculkan rasa percaya dan keadilan. Keadilan ini sangatlah penting, agar kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak, dan tujuan pembangunan negara-negara CMLV dapat terwujud.

IV. Strategi Koalisi dan *Forum Shopping*

RDC merupakan kerangka kerjasama yang disepakati negara-negara ASEAN sebagai upaya mengatasi kesenjangan pembangunan. Di bawah kerangka ini, negara-negara ASEAN menggunakan strategi koalisi. Odell berpendapat bahwa sebuah koalisi akan membentuk pertahanan yang dapat menyamakan kedudukan. Dengan turut andilnya Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina, menjadikan posisi negosiasi CMLV dengan Jepang lebih seimbang. Baik Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, masing-masing membutuhkan bantuan eksternal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negerinya. Williams dalam bukunya "*Multilateralism: Critique and Appraisal*" menyebutkan bahwa multilateralisme memberi keuntungan bagi pihak yang lemah untuk mendapatkan tindakan non diskriminasi, resiprositas, dan *self-restrain*, yang mana sering tidak didapatkan dalam negosiasi bilateral. Negosiasi multilateral juga memberikan manfaat seperti mendukung preferensi dan memangkas kompleksitas (J.S Odell, 2006:13).

CMLV bukanlah negara yang memiliki *bargaining position* yang kuat. Ini disebabkan negara-negara CMLV tidak memiliki rezim politik yang kuat dan kurangnya kapasitas untuk membangun struktur kelembagaan yang baik di dalam negaranya (Alavi dan Alim Ramadhan, 2008:30). Oleh karena itu, koalisi negara-negara CMLV dengan negara ASEAN yang lain sangatlah diperlukan untuk mendukung negosiasi CMLV dengan Jepang. Negosiasi dengan strategi koalisi dilakukan secara kolektif dibawah organisasi ASEAN, yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya negara CMLV, tetapi juga negara ASEAN yang lain.

Selain strategi koalisi, ASEAN memperkuat diplomasinya dengan membentuk forum-forum inisiatif sebagai instrument diplomasi. ASEAN menggunakan strategi *forum shopping* dalam membangun kerjasamanya dengan Jepang. *Forum shopping* adalah "*where there are multiple institutional options available, actors can 'forum' shop and strategically select the ones that fit their material or ideational preferences best*" (Nielsson, 2010:5). Forum shopping memungkinkan ASEAN untuk memilih kerjasama yang paling menguntungkan dengan Jepang dari berbagai pilihan forum yang dibentuk. Dalam artikel yang ditulis oleh Alter dan Meunier yang berjudul "*The Politics Of International Regime Complexity*", menyebutkan "*be they litigation and policy-making opportunities to pick forums that best suit an actor's interests, or opportunities to shift forums when an actor finds itself blocked within a single venue*". ASEAN memiliki kesempatan untuk memilih

forum yang paling sesuai dengan kepentingan ASEAN, atau kesempatan untuk menggeser atau mengalihkan forum ketika berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan di salah satu forum. Ini membuat ASEAN dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tidak berlama-lama dalam forum yang tidak menguntungkan.

Beberapa forum inisiatif yang dibangun ASEAN dengan Jepang seperti *Mekong River Commission* (MRC), *Greater Mekong Sub-region* (GMS), *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), Grup Kerja dalam Kerjasama Ekonomi di CMLV, dan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).

1. Mekong River Commission (MRC)

MRC atau Dewan Komisi Sungai Mekong merupakan wajah baru dari *Mekong Interim Committee* (MIC) yang dibentuk oleh Vietnam, Kamboja, Laos dan Thailand, yang kemudian Myanmar ikut bergabung di dalamnya, pada tahun 1997. Berikut adalah peta wilayah kerjasama Mekong River Commission:

Gambar 1: Peta kerjasama MRC



MIC sempat vakum pada 1975 dan mulai aktif kembali pada 1978 yang kemudian berubah nama menjadi MRC. Dewan pengurus MRC dilantik pada 1995. MRC bukanlah komisi yang diinisiasi oleh Jepang, atau dibentuk oleh ASEAN bersama dengan Jepang. Di awal pembentukannya, Amerika yang menjadi negara donor bagi MRC. Setelah Amerika meninggalkan Vietnam pada tahun 1975, negara-negara Eropa khususnya negara-negara skandinavia menggantikan posisi badan-badan bantuan pembangunan sebagai donor. Baru

setelah negara-negara Eropa berhenti, Jepang menggantikan posisinya sebagai donor bagi MRC. MRC dibentuk atas kesadaran akan kemiskinan di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Sungai Mekong. Kerjasama ini dibentuk dalam upaya pembangunan di negara-negara dekat Sungai Mekong.

Pada tahun 2001, MRC memfokuskan proyeknya untuk mendukung dan mengkoordinasikan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sungai Mekong. Mandat forum kerjasama MRC adalah “*to cooperate in all fields of sustainable development, utilization, management, and conservation of the water and related resources of the Mekong River Basin*”. Jepang diminta untuk membantu dalam membangun mode transportasi, melakukan studi tentang pengelolaan dan penggunaan air di Sungai Mekong, termasuk penilaian dampak dari bendungan hidroelektrik. Ini merupakan salah satu program *quality growth* melalui konservasi dan manajemen air, dengan mengutamakan pada pembangunan berkelanjutan di area sungai Mekong. Proposal tersebut diutarakan dalam *Mekong-Japan Summit* di Nay Pyi Taw, Myanmar, tahun 2014.

Mekong-Japan Summit sendiri dibentuk pada tahun 2009, atas dasar inisiasi Jepang. Sampai tahun 2014, pertemuan dari kerjasama ini meliputi *Summit Meeting, Mekong-Japan Foreign Minister’s Meeting, Mekong-Japan Economic Minister’s Meeting, Public-Private Cooperation in Mekong Region*, dan *Japan-Mekong Business Cooperation Committee*.

Bantuan Jepang dalam MRC mencapai lebih dari 5000 milyar yen (Taw, 2014: 1). Dalam laporan World Bank yang berjudul “*Project Performance Assessment Report, The Mekong River Commission Water Utilization Project*”, MRC telah berhasil membentuk mekanisme konservasi air di sungai Mekong. Tetapi, belum berhasil dalam mendukung dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan air di sungai Mekong. Dalam hal ini, MRC telah berhasil membuat pedoman dan aturan fasilitasi implementasi konservasi, tetapi tidak berhasil membuat pedoman kunci teknis, seperti dalam menentukan standar kualitas minimum yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek tersebut.

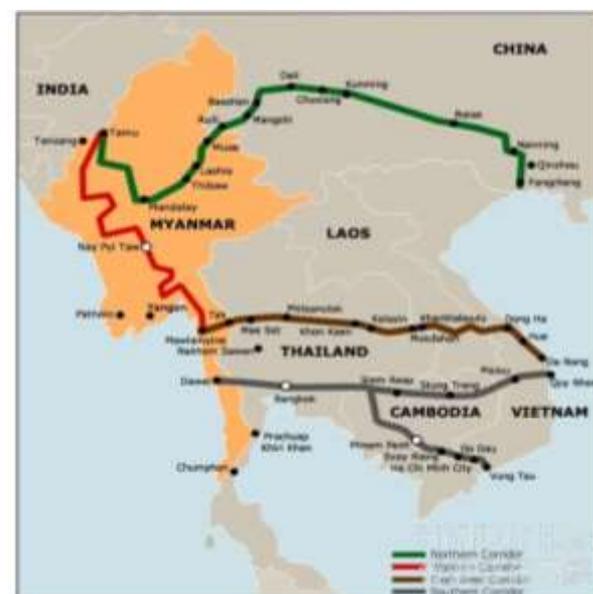
2. Greater Mekong Sub-region (GMS)

GMS diinisiasi oleh enam negara yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan China pada tahun 1992. Kerangka kerjasama ini mencakup sembilan sektor prioritas yakni, pertanian, lingkungan, investasi, pengembangan sumberdaya manusia,

energi, pariwisata, telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan fasilitasi perdagangan. Pada tahun 1998, GMS mengadopsi pendekatan koridor ekonomi (*economic corridor*), artinya pembangunan akan dilakukan di area yang spesifik dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan kebijakan fasilitasi perdagangan. Tujuan dari proyek GMS adalah meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi lintas batas dan link energi dari Vietnam tengah melalui Laos dan Thailand Utara ke Myanmar Timur dan dari Vietnam Selatan melalui Kamboja ke Thailand. Dengan adanya koridor ini, aliran barang, manusia, informasi dan energi antar perbatasan dapat difasilitasi diantara negara-negara dalam sub-regional.

Jepang mengirimkan misi bersama ADB ke negara CMLV dan Thailand pada 15-21 Juli 2001. Kementerian Luar Negeri Jepang memberikan bantuan berupa pembangunan infrastruktur di negara-negara GMS. Pada *GSM Leaders' Summit* pertama tahun 2002, disepakati empat koridor transportasi, Koridor Utara-Selatan dari Kunming ke Bangkok melalui Chiang Mai, Koridor Timur-Barat, Koridor Selatan, dan Koridor Utara, dari Nanning ke Hanoi. Jepang menempatkan prioritas misi pada Koridor Timur-Barat proyek Maulmyaing – Mukdahan - Da Nang dan Koridor Timur-Barat proyek Ho Chi Minh - Phnom Penh - Bangkok. Berikut ilustrasi gambar koridor dalam GMS:

Gambar 2: GMS Koridor Ekonomi



Pada proyek koridor Selatan, Jepang memberikan bantuan pada pembangunan jembatan Neak Loen yang melalui sungai Mekong dan pembangunan pelabuhan Thi Vay dekat kota Hochiminh. Sedangkan, proyek koridor Timur-Barat Jepang memberikan

bantuan pembangunan rute nasional di Vietnam Utara antara Hanoi dan pelabuhan di kota Hai Phong, merehabilitasi dan memperbaiki pelabuhan Hai Phong, serta membangun jembatan Bai Chay di Ha Long (Shiraishi, 2009). Bantuan yang diberikan Jepang untuk koridor Timur-Barat ini mencapai 3.273 milyar yen (Mission of Japan, 2015: 23)

Pada kenyataannya, kerjasama GMS ini tidak mendapatkan banyak progress. Hanya Koridor Utara-Selatan saja yang berjalan dinamis, sedangkan Koridor Selatan, Koridor Timur-Barat, dan Koridor Utara berjalan lambat (Basu Das, 2013:142).

3. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

IMT-GT diluncurkan pada Juli tahun 1993 yang focus pada 34 provinsi dengan pembagian 10 provinsi di Indonesia, 8 negara bagian di Utara Malaysia, dan 16 provinsi di Thailand. IMT-GT sebenarnya sudah ada sejak 1980-an, kemudian vakum dan baru lahir kembali pada 1993. Pembentukan IMT-GT dilatarbelakangi karena kurangnya pembangunan infrastruktur di tiga negara tersebut. Sehingga, tujuan dari kerjasama IMT-GT adalah memperbaiki infrastruktur khususnya yang melintasi batas-batas negara seperti jalan penghubung antar negara. Pada *Leaders' Summit* ke-2 di Cebu tahun 2007, disepakati Roadmap IMT-GT. Roadmap tersebut berisi empat koridor konektivitas ekonomi sebagai penguatan infrastruktur regional yang dapat meningkatkan perdagangan ekstra dan intra regional, investasi dan pariwisata. Beberapa koridor tersebut seperti Koridor Ekonomi Songkhla-Penang-Medan, Koridor Ekonomi Selat Malaka, Koridor Ekonomi Banda Aceh-Medan-Pekanbaru-Palembang, dan Koridor Ekonomi Malaka-Dumai. Berikut gambar wilayah kerjasama IMT-GT:

Gambar 3: Wilayah Kerjasama IMT-GT



Sekretariat IMT-GT berada di Putrajaya, Malaysia. Dimana tugasnya adalah mengkoordinasi semua aktivitas antara sektor privat, investor asing, dan mitra pembangunan lain termasuk Jepang. Pada tahun 2009, diluncurkan roadmap yang lebih luas dengan tujuh skala prioritas. yakni Pembangunan Pelabuhan Sumatera, Koridor Ekonomi Multimodal Transport Malaka-Dumai, Proyek Jalan Tol Sumatera, Daya Interkoneksi Malaka-Pekanbaru, Program Pembangunan Pelabuhan Thailand Selatan, Pelabuhan Kargo Pak Bara, dan Jalan Toll Hat Yai-Sadao di Thailand.

Dalam kerjasama IMT-GT, Jepang aktif dalam memberikan bantuan untuk keamanan pangan. Pada pertemuan IMT-GT di Hanoi tahun 2010, para pemimpin ASEAN meminta kerjasama dalam bidang keamanan pangan dan produk pertanian bernilai tinggi sebagai kunci kerjasama dengan Jepang. Tidak hanya mengabdikan permintaan tersebut, Jepang juga menambah prioritas kebijakan dengan mendukung perdagangan, investasi, pariwisata, dan meningkatkan konektivitas untuk provinsi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

4. Grup Kerja dalam Kerjasama Ekonomi di CMLV

Grup kerja ini didirikan pada bulan September tahun 1994. *Working Group on Economic Cooperation in CMLV* (Grup Kerja dalam Kerjasama Ekonomi di CMLV) dibentuk pada pertemuan ke-3 AEM-METI (*ASEAN Economic Ministers-Minister for Economic, Trade, and Industry*) di Chiang Mai pada April, 1994. Kerjasama ini dibawah payung para pemimpin ASEAN dengan para Menteri Ekonomi Jepang. ASEAN melakukan negosiasi dengan Jepang agar terlibat dalam pembangunan ekonomi di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Pada awalnya, bantuan Jepang ini ditujukan untuk pembangunan negara-negara CMLV agar negara-negara tersebut memiliki kapabilitas sehingga dapat bergabung dengan ASEAN (Shiraishi, 2009:23).

Pada pertemuan pertama Grup Kerja di Bangkok bulan Maret, 1995, disepakati bantuan teknis berupa workshop dan pelatihan untuk meningkatkan skill negara-negara CMLV sebagai salah satu langkah untuk bergabung dalam keanggotaan ASEAN. Selain itu, disepakati juga kerjasama penelitian dan pembelajaran untuk membuat draf rencana pembangunan khususnya di sektor industri. Grup Kerjasama ini berhasil membawa Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN, kemudian diikuti oleh Vietnam.

Pada pertemuan AEM-METI ke-6, disepakati kerangka kerjasama baru menggantikan Grup Kerjasama, yakni *ASEAN-MITI Economic and Industrial Cooperation Committee* (AMEICC). Tujuan dari kerjasama ini untuk membantu meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendukung integrasi regional dan peningkatan industri, tidak hanya bagi CMLV tetapi juga bagi negara-negara ASEAN lain.

5. Initiative for ASEAN Integration (IAI)

IAI diluncurkan pada pertemuan informal *ASEAN Summit* ke-4 di Singapura pada 22-25 November 2000. Kemudian pada 23-24 July 2001 dalam pertemuan ke-34 *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) di Hanoi, disepakati *Hanoi Declaration on Narrowing the Development Gap for Closer ASEAN Integration*. Setelah itu, pada pertemuan AMM ke-35 yang diadakan pada 29 Juli 2002 di Brunei, dibentuklah *IAI work Plan* dan proposal daftar program serta proyek yang akan dilaksanakan, yang kemudian disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada pertemuan *ASEAN Summit* pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.

IAI diimplementasikan selama enam tahun dari Juli 2002 sampai Juni 2008. Pada 15-16 Agustus 2002 diselenggarakan *IAI Development Cooperation Forum* di Jakarta. Forum tersebut ditujukan untuk memahami upaya integrasi regional serta kepedulian terhadap *IAI Work Plan*. Secara lebih rinci tujuan dari *IAI Work Plan* adalah:

1. Memfasilitasi pembangunan kerangka kebijakan, institusi, dan regulasi, serta
2. Menguatkan kapasitas negara-negara CMLV dengan: mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, memperbaiki pelayanan sipil sebagai upaya bersaing di ranah global

IAI Development Cooperation Forum yang lebih kecil kemudian diadakan di Brunei Darussalam pada 22 Januari 2003. Terdapat 100 proyek dalam kerangka kerja IAI, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta integrasi ekonomi regional. Rencana Kerja IAI dibentuk untuk kedua kalinya pada 2009 sampai 2015. Rencana kerja ini didasarkan pada program kunci di dalam *ASEAN Blueprint*. Semua program dalam IAI ini ditujukan untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas CMLV.

Negara-negara ASEAN-6 turut andil dalam program ini. Bantuan yang diberikan berupa pelatihan, penyediaan tenaga ahli, dan menyediakan peralatan-peralatan. Tugas

paling utama ASEAN-6 adalah memastikan negara-negara CMLV bergabung dalam arus utama pembangunan dengan membuat janji dan berkomitmen untuk membantu merealisasikan *IAI Work Plan*.

Tidak hanya kerjasama antar negara-negara ASEAN tetapi juga kerjasama dengan negara di luar ASEAN yang tergabung dalam *Dialogue Partner* (DP/mitra dialog) dan lembaga-lembaga pembangunan internasional. Terdapat 11 DP ASEAN yakni Korea Selatan, Jepang, India, UNDP (Norwegia), Australia, Uni Eropa, New Zealand, China, Kanada, Amerika, dan Rusia (Woon, 2015:229-230). Kerangka kerjasama *dialogue partner* sangat tepat digunakan dalam konteks kerjasama pembangunan. DP merupakan sebutan bagi negara mitra ASEAN dimana kerjasama yang dijalin didasarkan pada keputusan bersama, perencanaan bersama dan kegiatan pelaksanaan juga dilakukan bersama. Ada yang membedakan hubungan antara DP ASEAN dengan kerjasama lainnya, hubungan antara ASEAN dan *dialogue partner* ini didasarkan pada pijakan yang sama, bukan seperti hubungan *donor-client* dimana negara donor biasanya memiliki *upper-hand* (tangan diatas). DP atau mitra dialog lebih menggambarkan hubungan yang setara antara negara donor (*donor*) dan negara penerima donor (*recipient*). Dengan konsep ini ASEAN juga berusaha untuk menempatkan *leverage* yang sejajar antara ASEAN dan DP dalam proses negosiasi. Strategi yang digunakan ASEAN dalam penggunaan kata *dialogue partner* ini sangat tepat. Selain itu, komitmen enam negara ASEAN selain CMLV yang juga turut andil dalam program IAI, merupakan strategi yang tepat. Sehingga, dapat dilihat bahwa negara-negara ASEAN begitu berkomitmen untuk mewujudkan integrasi ASEAN. Pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN kepada DP adalah pendekatan pembagian biaya (*cost-sharing approach*). Seperti yang dilakukan dalam program Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) yang merupakan bagian dari upaya mengatasi kesenjangan ekonomi di dalam ASEAN, dimana Malaysia dan Jepang menggunakan pendekatan ini untuk melaksanakan *Third Country Training Program* (TCPT).

Seluruh negara DP didorong untuk ikut mendukung proyek *IAI Work Plan* dengan menyediakan bantuan pendanaan berbagai proyek. Di sini Jepang kembali dilibatkan dalam agenda upaya mengurangi kesenjangan ekonomi di dalam ASEAN. Seperti halnya negara DP yang lain, Jepang juga ikut memberikan bantuan dalam program IAI. Di bawah kerangka kerjasama *ASEAN-Japan Plan of Action*, Jepang mendukung terealisasinya *IAI Work Plan* bersama ASEAN.

Upaya ASEAN dalam melibatkan Jepang pada proyek IAI ini didahului oleh inisiasi Jepang untuk membiayai workshop yang diadakan oleh ASEAN di tahun 2001. Tujuan dari workshop tersebut untuk merumuskan rancangan kerja IAI. Baru pada tahun 2002, Jepang menerima proyek IAI dan menerima untuk membiayai beberapa proyek dalam IAI (Severino, 2006:302).

Dengan banyaknya forum kerjasama tentunya menguntungkan bagi ASEAN. Ketika salah satu forum tidak mendapatkan hasil maksimal, ASEAN dapat memilih forum lain yang dapat memaksimalkan kepentingan mereka. Seperti pada kerjasama GMS yang pada akhirnya tidak berjalan maksimal, negara-negara CMLV dapat memaksimalkan negosiasinya dalam forum-forum yang lain.

V. Kesimpulan

Jepang merupakan negara mitra ASEAN yang sangat strategis. Jepang memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan bantuan bagi ASEAN. Bagi Jepang, ASEAN adalah partner utama dalam ODA Jepang. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN kepada Jepang dalam upaya mempersmpit kesenjangan merupakan konsekuensi logis sebagai upaya teralisasinya integrasi yang lebih kuat diantara negara-negara ASEAN.

Turut andilnya semua negara anggota dalam proses negosiasi dengan Jepang, menunjukkan upayastrategi koalisi untuk menempatkan *bargaining position* yang seimbang antara ASEAN dan Jepang. ASEAN juga menggunakan kerangka *dialogue partner* dalam membangun hubungan kerjasama dengan Jepang. Tujuan dari kerangka kerja ini untuk menguatkan posisi ASEAN, bukan dalam hubungan *donor-recipient* tetapi hubungan yang seimbang antar patner. Sedangkan, strategi *forum shopping* yang digunakan negara-negara ASEAN, lebih menitik beratkan pada efektifitas forum kerjasama yang dibangun antara ASEAN dan Jepang. Dengan strategi ini, ASEAN membuat berbagai forum inisiatif dan memungkinkan ASEAN mendapatkan bantuan pembangunan di forum yang lebih menguntungkan. Kombinasi antara strategi koalisi dan *forum shopping* mendukung terealisasinya diplomasi ASEAN sebagai upaya mengurangi kesenjangan di negara-negara tersebut.

Sinergisitas negara-negara ASEAN dalam usaha membangun integrasi wilayah harus disambut baik oleh negara-negara lain, khususnya Jepang. Kerjasama RDC ASEAN-Jepang merupakan upaya strategis kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan dalam

kerangka kerjasama multilateral. Walaupun, beberapa kerjasama kurang maksimal seperti dalam GMS, upaya pengurangan kesenjangan dalam forum yang lain dapat berjalan dengan baik. Peluang kerjasama di dalam banyak forum regional ASEAN terbuka lebar, Jepang dan negara-negara lain juga akan dimudahkan karena integrasi tersebut. Untuk itu, sudah sepantasnya upaya integrasi ASEAN disambut baik oleh semua pihak, dan pemberian dukungan sepenuhnya terhadap seluruh pencapaian tujuan-tujuan integrasi, termasuk dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan jauh dari kesenjangan.

Daftar Pustaka

- Alter, Karen J., dan Sophie Meunier. *The Politics Of International Regime Complexity*. Diakses pada 7 Agustus 2016; diunduh dari <https://www.princeton.edu/~smeunier/AlterMeunierFramingPiece2.pdf>
- Anderson, Jeffrey J. 1999. *Regional Integration and Democracy. Expanding on the European Experience*. United State of America: Rowman and Littlefield Publishers.
- Asian Development Bank. *Infrastructure For Support Inclusive Growth and Poverty Reduction in Asia*. Philippines: ADB Publication. 2012.
- Bergeijk, Peter A.G. Van, Maaik Okanoijmans, dan Jan Melissen. *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspective*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Cabinet Decisions. *Japan's Official Development Assistance Charter*. Diakses pada 20 November 2016; diunduh dari <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref1.html>
- _____. *Concepts and explanation*. Diakses pada 8 November 2015; diunduh dari <http://www.openaid.se/concepts-and-explanations/>
- Das, Sanchita Bas. *ASEAN-Japan Cooperation on ASEAN's Development Gap and Connectivity: Working Together with Regional and Subregional Initiative*. Diakses pada 6 Agustus 2016; diunduh dari http://www.jcie.org/japan/j/pdf/pub/publst/1451/8_bas.pdf
- Document of The World Bank. *Project Performance Assesment Report, The Mekong River Commicion Water Utilization Project*, 28 Juni 2012 (diakses pada 18 Agustus 2016); diunduh dari http://ieg.worldbank.org/Data/reports/PPAR-70332-P045864-Mekong_River_Commission_Water_Utilization_0.pdf.
- Ganesan, N., dan Ramses Amer. *International Relations in Southeast Asia Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapura: ISEAS Publishing, 2010.
- Martinussen, John Degnol, dan Poul Engbergedersen. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed Booka, 2003.
- Menon, Jayant. *Moving Too Slowly Towards An ASEAN Economic Community*. 14 October 2014. Diakses pada 25 Agustus 2016; diunduh dari <http://www.eastasiaforum.org/2014/10/14/moving-too-slowly-towards-an-asean-economic-community/>
- McGilivray, Mark, dan David Carpenter. *Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drives and Policy Options*. Inggris: Routledge, 2013.
- Ministry of Affairs Japan. *Japan Cooperation to "Initiative for ASEAN Integration"*. Diakses pada 17 Agustus 2016; diunduh dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/relation/iai.html>

- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Japan's Official Development Assistance White Paper 2012*. Diakses pada 20 November 2016; diunduh dari http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2012/html/honbun/b3/s2_3_01.html
- Mission of Japan to ASEAN 2015. *Japan-ASEAN Friendship and Cooperation, Share Vision, Share Identity, Share Future*. Diakses pada 17 Agustus 2016; diunduh dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4a7qGNaEsu4J:www.asean.emb-japan.go.jp/documents/20150402%2520pamphlet.pdf+%&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Mission of Japan to ASEAN. *Japan Cooperation Toward the AEC*. Diakses Pada 20 November 2016; diunduh dari <http://www.asean.emb-japan.go.jp/documents/20151002.pdf>.
- Patrick, Hugh. "Legacies of Change: The Transformative Role of Japan's Official Development Assistance in its Economic Partnership with Southeast Asia." *Discussion Paper Series APEC Study Center Columbia University*, No. 54 (2008).
- Pushpanathan. *ASEAN's Strategy Toward Its Dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process*. 4 November 2003. Diakses pada 1 September 2016; diunduh dari <http://www.asean.org/resources/item/asean-s-strategy-towards-its-dialogue-partners-and-asean-plus-three-process-by-s-pushpanathan>
- S. Nuraeni, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Severino, C. Rodolfo. *Southeast Asia in Search of An ASEAN Community*. Singapura: ISEAS Publishing, 2006.
- Shiraishi, Masaya. "Japan Toward the Indochina Sub Region." *Journal of Asia-Pacific Studies, Waseda University*, No. 13 (2009).
- Sing, Lim Hua. *Alih Bahasa: Peran Jepang di Asia*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Taw, Nay Pyi. *Joint Statement of the Sixth Mekong-Japan Summit*. Diakses pada 20 November 2016; diunduh dari <http://www.mofa.go.jp/files/000059391.pdf>.
- Thambipillai, Pushpa. *External Partners in ASEAN Community Building: Their Significance and Complementarities*. Diakses pada 18 Oktober 2016; diunduh dari <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/singapur/04601/2007-3/pushpa.pdf>.
- _____. *Vietnam Asks Japan For More Help To Mekong River Commission*. Diakses pada 11 Agustus 2016; diunduh dari <http://english.vov.vn/Politics/Vietnam-asks-Japan-for-more-help-to-Mekong-River-Commission/283716.vov>
- Woon, Walter C. M. *The ASEAN Charter: A Commentary*. Singapura: NUS Press, 2015. www.ipu.org/splz-e/nairobi16/policy-brief.pdf